

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permukiman kumuh adalah masalah yang dihadapi di setiap kota di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Pengkajian tentang permukiman kumuh (*slum*), pada umumnya mencakup tiga hal, diantaranya keadaan fisik, keadaan social ekonomi yang bermukim tersebut serta dampak dari kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi buruk, infrastruktur serta sanitasi dan drainase serta persampahan yang kurang berfungsi dengan baik.

Salah satu sifat urbanisasi yang terjadi pada negara yang sedang berkembang umumnya dikatakan sebagai urbanisasi semu (*Pseudo Urbanization*) yang dapat diartikan bahwa urbanisasi semu merupakan fenomena Migrasi dari desa ke kota tanpa adanya persiapan, sehingga pada Urbanisasi semu ini ditandai dengan berbagai masalah seperti kemiskinan perkotaan, membengkaknya sektor informal dengan berbagai permasalahan. Sebagai lawannya adalah sifat urbanisasi di negara-negara industri yang maju yang dikatakan sebagai urbanisasi murni (*True Urbanization*) sebagaimana Urbanisasi murni merupakan fenomena migrasi dari desa ke kota dengan dilakukan persiapan untuk menunjang kebutuhan di perkotaan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kemiskinan di perkotaan maupun permasalahan lainnya yang disebabkan urbanisasi, dan sebaliknya fenomena urbanisasi menjadi memberikan dampak baik untuk keberlangsungan suatu kawasan perkotaan. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa di negara-negara maju perpindahan penduduk dari desa ke kota telah dijamin oleh tersedianya lapangan pekerjaan non pertanian di kota-kota, tetapi umumnya di negara sedang berkembang pekerjaan non pertanian di kota tidak terjamin (Sujarto dalam Kuswartojo, 2005).

Berdasarkan Renstra MDGs melalui departemen pekerjaan umum menargetkan pada tahun 2020 mendatang semua kota di Indonesia akan

terbebas dari kawasan kumuh. Hal itu sejalan dengan Program MDGs (*Milenium Development Goals*) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Tujuan Pembangunan Milenium”, adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 Negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa Sasaran yaitu:

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,
3. Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,
4. Menurunkan Angka Kematian Anak,
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu,
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan
8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan

Pemerintah telah berupaya memenuhi target MDGs menangani perumahan dan permukiman kumuh perkotaan, bahkan zero kumuh sudah secara jelas ditargetkan pada RPJMN 2015-2019 tepatnya di tahun 2019. Perancangan zero kumuh 2019 yang telah diikuti dengan arah kebijakan dan strategi yang fokus serta alokasi anggaran yang memenuhi RPJMN 2015-2019. Langkah awal dalam mengejar target zero kumuh di 2019 sebenarnya telah dimulai oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta karya sejak tahun 2014 dengan menyusun *road map* penanganan kumuh serta pemutakhiran data kumuh yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan lembaga yang terkait serta pemerintah daerah diseluruh Indonesia. (RP2KPKP Kab.Jepara, 2019).

Berdasarkan studi terdahulu Zenal Mutaqin (2017) menjelaskan bahwa Hasil penelitian penentuan kriteria prioritas dalam penanganan lingkungan permukiman kumuh diperkotaan dalam kerangka 3 pilar pembangunan berkelanjutan berturut-turut adalah aspek lingkungan sebesar 46,7%, aspek sosial sebesar 31,2% dan aspek ekonomi sebesar 22,1%.

Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas adalah mengelola sampah rumah tangga sebesar 100 %, sarana persampahan sebesar 93,5 %, kegiatan gotong royong sebesar 83,6%, drainase lingkungan sebesar 66,2 %, sanitasi sebesar 66,1 %, pinjaman modal usaha sebesar 63,0 %, pelatihan dan kewirausahaan sebesar 61%. Selanjutnya berdasarkan kegiatan prioritas tersebut, maka dari 12 lokasi yang dianalisis, diperoleh 5 wilayah prioritas yaitu RT 30, 31, 35, 02, dan RT 01. Kawasan prioritas ini merupakan wilayah yang memiliki kualitas lingkungan permukiman yang rendah, dimana kualitas sarana dan prasarannya yang ada saat ini kurang memadai.

Solehati, dkk (2017) menjelaskan bahwa dari hasil analisis menunjukkan bahwa Gampong Telaga Tujuh merupakan permukiman kumuh dengan kategori kumuh berat. Tingkat kekumuhan disebabkan karena faktor pendidikan, ekonomi, dan kurangnya sarana prasarana di Gampong Telaga Tujuh. Dilihat dari tipologi permukiman kumuh Gampong Telaga Tujuh dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) Permukiman kumuh di tepi pantai (2) Permukiman kumuh di daerah rawan bencana alam. Berdasarkan karakteristik permukiman kumuh, maka penataan Gampong Telaga Tujuh dapat dilakukan dengan 2 (dua) model, yaitu: (1) Permukiman kembali (*relocation*) (2) Peremajaan. Selain itu Ruli dan Fadjarani (2015) menjelaskan Hasil Penelitian dapat diketahui bahwa konsep penataan permukiman kumuh yang cocok untuk dikembangkan dalam penataan lingkungan yaitu *Model Land Sharing*, yaitu penataan ulang di atas lahan dengan tingkat kepemilikan masyarakat cukup tinggi.

Adapun beberapa permasalahan dalam kajian penanganan kumuh yang berkembang yaitu kondisi diberbagai lingkungan diantaranya:

1. Keadaan Bangunan Gedung
2. Keadaan Jalan Lingkungan
3. Keadaan Penyediaan Air Minum
4. Keadaan Drainase Lingkungan
5. Keadaan Pengelolaan Air Limbah
6. Pengelolaan Persampahan

7. Pengamanan Kebakaran
8. Kualitas tata lingkungan.

Resa, Saam dan Tarumun (2017) menjelaskan Faktor-faktor yang menjadi penyebab kawasan permukiman antara lain: belum adanya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan legalitas pembangunan, rendahnya daya beli masyarakat, layanan infrastruktur permukiman belum memadai, dan belum optimalnya penegakan aturan. Faktor-faktor tersebut yang dinilai dominan memberikan kontribusi kekumuhan di Kampung Bandar. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berdampak satu sama lain. Penataan kawasan permukiman kumuh Kampung Bandar dilakukan dengan 2 strategi, yaitu strategi pencegahan dan strategi peningkatan kualitas. Strategi pencegahan yang terdiri dari: peningkatan kapasitas, pengawasan serta pemberdayaan masyarakat. Strategi kualitas terdiri dari: pemugaran (rehabilitasi), peremajaan (revitalisasi), dan permukiman kembali (relokasi).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh faktor kondisi gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, keadaan proteksi kebakaran, kualitas tata lingkungan terhadap kualitas tata lingkungan untuk penataan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Jepara?
2. Variabel apakah yang merupakan penyebab dominan yang mempengaruhi kualitas tata lingkungan untuk penataan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Jepara?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini mengarah pada permasalahan yang ada dan pembahasannya tidak meluas supaya tidak menyimpang dari tujuan penelitian nantinya, maka dilakukan beberapa batasan diantaranya:

1. Penekanan penelitian ini dilakukan hanya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara.
2. Penelitian ini hanya mencari dan menganalisis kualitas tata lingkungan untuk penataan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Jepara.
3. Analisis penelitian ini berdasarkan penyebaran kuisioner atau angket, tidak berdasarkan data teknis (hasil laboratorium).

1.4. Tujuan Penelitian

Konsisten dengan permasalahan yang dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh faktor keadaan gedung, keadaan jalan lingkungan, keadaan penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, keadaan pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, kondisi proteksi kebakaran, Kualitas tata lingkungan terhadap kualitas tata lingkungan untuk penataan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Jepara.
2. Menganalisis penyebab dominan yang mempengaruhi kualitas tata lingkungan untuk penataan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Jepara.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan bukti empiris mengenai kualitas tata lingkungan untuk penataan kawasan permukiman kumuh.

2. Bagi Organisasi

Bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan mengenai beberapa hal kualitas tata lingkungan untuk penataan kawasan permukiman kumuh.

3. Bagi peneliti

Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kualitas tata lingkungan untuk penataan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Jepara.

4. Bagi pembaca

Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya.

1.6. Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memaparkan hasil penelitian sendiri, apabila mengambil hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, penulis akan mencantumkannya sebagai referensi. Penelitian dalam bentuk tesis tentang analisis kualitas tata lingkungan untuk penataan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Jepara belum pernah ada. Produk tesis yang membahas mengenai lingkungan kawasan permukiman kumuh yang sudah ada berada di lokasi lain dan variabel yang digunakan tidak selengkap pada penelitian ini.

1.7. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian tindakan kelas yang dilakukan adalah:

1. Lokasi : DPUPR, Bappeda, Disperkim dan Bagian pembangunan Setda Jepara
2. Alamat : Jepara
3. Waktu : Bulan September sampai dengan Oktober 2019

Faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah analisis kualitas tata lingkungan untuk penataan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Jepara.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memahami hasil penelitian, maka digunakan sistematika penelitian tesis sebagai berikut :